



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis strategi pemberdayaan masyarakat pasca pandemi: studi kasus di indonesia dalam perspektif ekonomi pertahanan

Ivan Yulivan

Universitas Pertahanan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 17th, 2022

Revised Oct 25th, 2022

Accepted Nov 22nd, 2022

Keyword:

Community empowerment

Post-pandemic

Defense economy

Economy recovery

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had an impact on economic changes in Indonesia. Therefore, this study aims to analyze more deeply related to the post-pandemic community empowerment strategy in the perspective of the defense economy in Indonesia. This study collaborated with ten participants through a qualitative approach. Data collection was carried out with a 95-minute Focus Group Discussion to review data related to post-pandemic economic changes and community empowerment strategies. In-depth interviews were conducted to obtain information related to the planning and development of the post-pandemic defense economy. The interview technique was conducted face-to-face and there were five participants. The interviewees included one community empowerment strategist, two defense economists and two representatives of non-governmental organizations. The duration of time required for in-depth interviews ranges from 65-90 minutes for one participant. The results of this study indicate the process of ratification of community empowerment and economic recovery efforts in Indonesia. In addition, planning and development of the post-pandemic defense economy. This research has implications for community development through processes and actions that can increase community empowerment after the pandemic



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Ivan Yulivan,

Universitas Pertahanan, Indonesia

Email: ivanyulivan42@gmail.com

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian yang krisis. Upaya pemerintah di dunia dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19 menyebabkan banyak usaha kecil dan korporasi berkurang serta mengalami kebangkrutan. Menurut Arredondo et al. (2021), peristiwa pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat pengangguran sebesar 14,7% memuncak pada bulan April di tahun 2021. Menurut laporan yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2020, krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 mungkin telah membatasi tingkat pertumbuhan ekonomi dunia menjadi -3, pada tahun 2020 (Junfeng et al., 2022). Disisi lain, pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut pasca pandemi Covid-19, termasuk upaya vaksinasi. Namun, sejumlah hambatan terus menimbulkan risiko bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 tetap menjadi risiko terbesar bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas perekonomian, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga secara global (Fu et al., 2020; Siregar et al., 2021). Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir resiko dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan perekonomian. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan terus berkembang. Hasil penelitian Narasri et al. (2020) menunjukkan bahwa di Thailand untuk

dapat mengelola pangan pasca pandemic Covid-19 dilakukan dengan model pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan hubungan yang erat. Oleh karena itu, di dalam kelompok masyarakat terdapat unsur saling membutuhkan satu sama lain. Steiner et al.(2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memberikan kekuatan kepada kelompok yang tidak berdaya untuk hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi tindakan sosial dimana penduduk melalui komunitasnya melakukan organisasi untuk membuat perencanaan dan tindakan kolektif dalam memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan sosial(Ataöv et al., 2021). Hasil penelitian Hossen (2016) menunjukkan bahwa salah satu strategi untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemetaan partisipatif agar dapat memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat tersebut tentang informasi geografis dan batas-batas politik. Strategi pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan ekonomi kelompok masyarakat dengan melakukan pengembangan pariwisata (Johnson, 2014). Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat memiliki konsep berpusat pada partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan keberlanjutan. Sehingga, konsep inilah yang memenuhi kebutuhan dasar dari strategi pemberdayaan masyarakat dan mencegah kemiskinan lebih lanjut (Luitel, 2017). Hasil penelitian Rolfe (2016) memberikan contoh bahwa negara Skotlandia dalam melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat berupaya untuk membatasi bahaya kekuatan agensi yang mengubah partisipasi menjadi manipulasi. Sehingga, pada setiap proses pengembangan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan optimalisasi berbagai sumber daya yang tersedia. Untuk itulah proses pengembangan memerlukan berbagai dukungan baik moril dan materil seluruh pihak yang berkepentingan (Palutturi et al., 2021). Dengan harapan, pemberdayaan yang dilakukan jelas dan spesifik.

Le dan Tran-Nam (2018) menggambarkan bahwa negara berkembang melakukan pembangunan dengan modernisasi. Sehingga, pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut mengalami ketimpangan dan terjadi ketidakmerataan distribusi pembangunan kepada masyarakat. Dengan kata lain, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sebaiknya tidak melakukan langkah yang diskriminatif dan menghilangkan kekuatan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Disamping itu, dalam melakukan pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tidak dibenarkan bila prosesnya dilakukan melalui penghilangan daya sosial ekonomi dan menjauhkan mereka dari akses pada berbagai sumber ekonomi serta kehidupan. Faskhutdinov (2015) menambahkan bahwa tidak semua negara sesuai dengan pembangunan modernisasi. Sehingga, pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan dapat dijadikan sebagai mitra yang sejajar. Hal ini dikarenakan sebagai kelompok masyarakat, mereka memiliki kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Rothman, Tropman dan Erlich dalam (McDonough, 2013) menunjukkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui model intervensi komunitas. Model pemberdayaan tersebut memiliki tiga pendekatan yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan dan kebijakan sosial, dan aksi sosial. Pengembangan masyarakat lokal dilakukan melalui komunikasi dan proses diskusi yang melibatkan individu dan kelompok (Bechange et al., 2021). Sedangkan perencanaan dan kebijakan sosial berperan untuk pengumpulan data serta keterampilan untuk melakukan analisis. Selain itu taktik tergantung dengan hasil analisis. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat dilakukan dengan penuh demokratis dan tidak ada unsur paksaan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat pasca pandemi dalam perspektif ekonomi pertahanan. Menurut Purwandari et al. (2018) pemberdayaan masyarakat lebih baik dilaksanakan secara bertahap dan saling berkesinambungan. Hal ini dikarenakan proses pemberdayaan membutuhkan waktu agar dapat dilakukan secara logis dan sederhana. Mengingat pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir diseluruh dunia, kondisi ini berdampak pada masyarakat di berbagai aspek kehidupan(Hall et al., 2020; Agustina et al., 2021). Selain itu, Covid-19 berdampak parah pada pengangguran dan berkurangnya pendapatan rumah tangga yang mengakibatkan kerawanan pangan global(Narasri et al., 2020). Oleh sebab itu, krisis ekonomi berlangsung sejak diberlakukannya kebijakan pembatasan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi terjadinya ketidakamanan dan krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh *lockdown* akibat pandemi Covid-19. Sehingga, kondisi tersebut telah melemahkan otoritas negara diseluruh dunia(Ardo et al., 2022). Hasil penelitian Vernengo dan Nabar-Bhaduri (2020) menunjukkan bahwa krisis ekonomi Covid-19 membuat masyarakat mengalami krisis dan ketidakberdayaan selama pandemi berlangsung. Untuk itulah penting bahwa negara melibatkan kebijakan perlindungan sosial yang efektif untuk mengurangi tantangan keamanan guna mewujudkan stabilitas sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurut van der Ploeg (2020) salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pasca pemulihan dari pandemi diperlukan kedaulatan pangan, pertanian, pasar teritorial dan agroekologi. Disamping itu, komponen ekonomi pertahanan juga berkaitan dengan pembangunan kekuatan untuk mencegah ancaman terhadap krisis yang terjadi. Meskipun begitu, Cheung (2011) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ekonomi pertahanan akan bertransisi dari inovator peniru hibrida menjadi kekuatan inovasi yang lengkap. Sehingga, strategi pemberdayaan masyarakat dapat mengarah pada memperkuat inovasi. Hal ini dikarenakan pada saat pasca pandemi Covid-19 memaksa seluruh

pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan kekuatan inovasi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan studi Fadhilah (2020) yang menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat selama Covid-19 yang dilakukan sebagai kekuatan inovasi yang dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi. Model pemberdayaan yang dilakukan yaitu mengelola manajemen distribusi Islam untuk mengatasi krisis ekonomi.

Berkenaan dengan kekuatan inovasi, pandemi covid-19 mengakibatkan peningkatan kemiskinan (Dasgupta et al., 2021). Oleh sebab itu, kondisi ini menjadi pukulan tersendiri bagi berbagai negara di seluruh dunia karena mereka berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemic selama satu tahun. Sehingga, mereka dituntut untuk terus berupaya dalam melakukan berbagai inovasi sebagai langkah meminimalisir krisis ekonomi. Seperti yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya, strategi pemulihan dilakukan untuk dapat terus meningkatkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Li dan Mutchler (2020) menunjukkan bahwa strategi pemulihan yang dilakukan di Amerika Serikat salah satunya dengan keamanan ekonomi pada kelompok masyarakat usia tua dan sudah tidak produktif. Sedangkan, China melakukan strategi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang memperhatikan masyarakat (Ba & Bai, 2020). Selain itu, perekonomian mereka juga didukung oleh teknologi digital. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat menjadi alternatif di beberapa negara dalam melakukan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 (Rolfe, 2016; Narasri et al., 2020; van der Ploeg, 2020; Ataöv et al., 2021; Steiner et al., 2022). Menurut Chambers (1996) terdapat konsep pembangunan ekonomi yang berasaskan strategi pemberdayaan masyarakat yaitu *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Sehingga, konsep tersebut mengarahkan strategi pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan yang tidak hanya memiliki fokus pada kebutuhan dasar masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, Friedman (1994) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek dari pemberdayaan masyarakat yaitu: 1) *enabling* yaitu menciptakan suasana yang dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk terus berkembang; 2) *empowering* dengan memperkuat potensi dari masyarakat tersebut melalui langkah-langkah strategis agar mereka berdaya; dan 3) *protecting* dengan melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan dari masyarakat yang lemah.

Disisi lain, untuk memberdayakan masyarakat pemerintah Indonesia melakukan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian Hanotubun (2020), Indonesia berupaya untuk meminimalisir krisis yang terjadi akibat pandemi. Hal ini dilakukan dengan menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25bps menjadi 4%. Selain itu, suku bunga dari *Lending Facility* juga ikut mengalami penurunan sebesar 25bps menjadi 5.50%. Upaya tersebut dilakukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik ditengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global yang terjadi. Strategi dari penurunan BI7- Day Reverse Repo Rate juga dilakukan untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali. Disisi lain, Sutrisno (2020) menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca pemulihan krisis ekonomi akibat Covid-19 melalui Usaha Menengah Kecil Makro (UMKM) dan pariwisata. Sehingga, peran ekonomi pertahanan menjadi penting dalam menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Menurut Wardhana (2016), ekonomi pertahanan sebagai alat ekonomi digunakan untuk meninjau bidang pertahanan dan isu lain seperti politik anggaran pertahanan, pembiayaan industri pertahanan serta dampak kebijakan nasional dalam bidang industri terhadap sektor pertahanan, keterkaitan terhadap lowongan pekerjaan, kondisi ekonomi makro dan mikro serta ekonomi-politik nasional. Sehingga, dengan adanya kondisi pasca pandemic Covid-19 ekonomi pertahanan menjadi perspektif yang dapat ikut meninjau langsung kondisi ekonomi makro dan mikro di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan kebijakan publik desa wisata sebagai solusi ekonomi di masa pandemi Covid-19 untuk mendukung ekonomi pertahanan (Rianto et al., 2021). Strategi tersebut sebagai pondasi ekonomi pertahanan. Namun, sampai saat ini pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Sehingga, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia khususnya dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Karena pandemi Covid-19 menunjukkan tingkat keparahan yang lebih besar dalam hal aktivitas ekonomi, dibandingkan dengan yang dialami oleh krisis keuangan global (Li et al., 2021). Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi pertumbuhan dan pemerataan dalam ekonomi pertahanan yaitu paradigma kesejahteraan dan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami strategi pemberdayaan masyarakat pasca pandemi dalam perspektif ekonomi pertahanan di Indonesia. Mengingat, masalah yang dianalisis memiliki sifat sosial dan dinamis. Untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat, peneliti melakukan kerjasama dengan empat ahli strategi pemberdayaan masyarakat, empat perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan empat ahli ekonomi pertahanan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Focus

Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Pada penelitian ini, FGD dilakukan untuk melengkapi dan mendukung hasil wawancara. Selain itu, FGD digunakan sebagai salah satu bentuk teknik triangulasi metode agar dapat dipastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang sah. Untuk menjaga kode etik penelitian, partisipan menggunakan nama samara. Dari 12 peserta, kami membagi ke dalam dua kelompok FGD dengan masing-masing kelompok berjumlah enam orang. Kedua kelompok FGD memiliki topik diskusi yang berbeda yaitu kelompok A: proses ratifikasi pemberdayaan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi di Indonesia. Lalu kelompok B: perencanaan dan pembangunan ekonomi pertahanan pasca pandemic. Kedua topik tersebut didasari oleh konsep aspek pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pertahanan (Friedman, 1994; Chambers, 1996; Wardhana, 2016). Proses FGD dilakukan selama 95 menit dengan persiapan dari tim peneliti yang ikut menjadi moderator dan notulen.

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh keterangan terkait dengan perencanaan dan pembangunan ekonomi pertahanan pasca pandemi. Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka dan partisipan berjumlah lima orang. Partisipan yang diwawancarai merupakan satu ahli strategi pemberdayaan masyarakat, dua ahli ekonomi pertahanan dan dua perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan peserta FGD. Durasi waktu yang dibutuhkan dalam wawancara mendalam mulai dari 65-90 menit untuk satu orang partisipan. Pemilihan partisipan dilatarbelakangi oleh pengetahuan mereka terhadap pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi pertahanan. Pedoman yang disusun oleh peneliti dalam wawancara mendalam meliputi: 1) kegiatan pemberdayaan, 2) pemandirian masyarakat, 3) upaya pemulihan ekonomi, 4) pembangkitan ekonomi pertahanan pasca pandemic, 5) pertumbuhan ekonomi pertahanan dan 6) peranan penting militer mendorong ekonomi pertahanan. Sehingga, wawancara semi terstruktur dilakukan dengan diawal pertanyaan terkait kegiatan pemberdayaan yang dilakukan baik oleh LSM maupun pemerintah pasca pandemic Covid-19. Hasil wawancara kemudian diselaraskan dengan hasil FGD untuk mendukung hasil penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang diadopsi oleh Miles dan Huberman(1994). Peneliti melakukan pengumpulan data melalui hasil wawancara dan FGD, Kemudian, hasil data yang sudah dikumpulkan direduksi dengan menggabungkannya kedalam bentuk tulisan. Selanjutnya data diolah dan dikategorikan sesuai dengan tema penelitian. Setelah itu, pada tahap kesimpulan, studi ini menjelaskan hasil temuan penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan aspek temuan. Untuk mengidentifikasi perspektif ekonomi pertahanan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan proses ratifikasi pemberdayaan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi di Indonesia. Studi ini berimplikasi pada pengembangan masyarakat melalui proses dan tindakan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat pasca pandemi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam proses penyajian data, peneliti menerapkan kode etik penelitian dengan tidak menuliskan nama asli dari partisipan. Sehingga, partisipan menggunakan kode JA - JE. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya pandemi Covid-19 mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Disamping itu, titik fokus yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu pada saat sosialisasi dan identifikasi masalah diantara pendamping dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dari hasil FGD yang dilakukan terdapat dua tema yang ditemukan yaitu pemberdayaan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi di Indonesia serta perencanaan dan pembangunan ekonomi pertahanan pasca pandemi Covid-19. Berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan, partisipan memberikan pendapatnya bahwa sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, sosialisasi untuk terus menjaga protokol kesehatan dilakukan. Disamping itu, pemerintah Indonesia terus mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pasca pandemi Covid-19. Sehingga, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi alternatif bagi pemerintah untuk dapat mengontrol penyebaran virus dan mengupayakan agar kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan. Kondisi tersebut menjadi proses panjang bagi pemerintah untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Hasil wawancara terhadap partisipan JD menambahkan bahwa:

“mengajak masyarakat untuk ikut menghadiri sosialisasi program kebijakan pemerintah merupakan salah satu langkah memotivasi mereka terlibat secara aktif terhadap program yang dilaksanakan” (JD, Ahli Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 2021).

Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pemberdayaan memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat agar dapat hidup lebih baik dan tidak bergantung pada siapapun. Data wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19, peran dari

masyarakat menjadi penting. Karena, dengan adanya sosialisasi aparaturnegara dan pemangku kebijakan dapat memahami kondisi dan situasi yang perlu untuk ditingkatkan.

“Dalam melakukan sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan memang sebaiknya didampingi suatu tim fasilitator. Itulah yang kami lakukan pada proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai LSM, kami berupaya untuk mendampingi masyarakat yang rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai kebijakan pemerintah ditengah pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, peran dari tim fasilitator menjadi penting pada tahap awal proses pendampingan” (JA, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, 2021).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pemulihan melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan langkah sosialisasi maupun pendampingan untuk diskusi. Sosialisasi tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pihak tetapi juga ada pihak lain yang ikut berkontribusi. Dengan adanya sosialisasi ditengah masyarakat dapat memunculkan diskusi terkait masalah yang dialami oleh mereka selama pandemi berlangsung. Oleh karena itu, melalui hasil FGD yang dilakukan, upaya pemulihan ekonomi dapat diawali dengan tahap sosialisasi. Karena proses pemberdayaan masyarakat juga memiliki faktor internal (*self-organizing* dari masyarakat) dan eksternal (tim fasilitator). Sehingga, pemerintah tidak sendiri dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena, LSM juga ikut serta dalam membantu memulihkan krisis pasca pandemi. Mereka mempersiapkan secara serius para pengurus kelompok yang terpilih dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan baik dari aspek teknis, ekonomi, manajerial, sikap dan perilaku (Herdiansah, 2016).

“Kegiatan pemandirian masyarakat kami lakukan dengan analisis keadaan yang terkait dengan potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi bersama dengan masyarakat. Berkenaan dengan pandemi Covid-19, beberapa pedagang mulai mengeluhkan sepi nya pembeli. Adapula yang kehilangan pekerjaan. Sehingga, kami berupaya untuk secara bersamaan mencari solusi dan bekerjasama dengan pejabat setempat (JB, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, 2021). Sebenarnya, tim fasilitator hanya bertugas sebagai pendamping. Tetapi, semenjak adanya pandemi Covid-19, tim kami ikut membantu masyarakat yang mengalami kesulitan terkait pendataan untuk bantuan yang diberikan pemerintah. Kami berupaya untuk mensosialisasikan dan menjelaskan langkah-langkah kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian ditengah pandemic Covid-19. Meskipun memang tidak mudah pada awal proses kegiatan, tetapi melalui pendampingan dan juga kerjasama kelompok masyarakat menjadi lebih mudah melakukan pemecahan masalah. Setelah itu mereka mampu untuk mandiri”. (JA, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, 2021).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak dapat dipungkiri LSM menjadi Lembaga non pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap pemerintah (Ronasifah et al., 2019). Disamping itu, hasil temuan ini menggambarkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat bukan sesuatu hal yang mudah untuk diimplementasikan. Terlebih pasca pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia.

“Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan terutama pada investasi dan juga krisis ekonomi. Beberapa peraturan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi alternatif pengendalian penyebaran virus Covid-19. Sehingga setiap daerah memiliki level yang berbeda sesuai dengan kondisi penyebaran yang terjadi. Peraturan inilah yang menjadi penting untuk terus disosialisasikan bukan hanya melalui media sosial tetapi juga secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Hal ini mempengaruhi *goal attainment* yang menjadi sistem untuk mencapai tujuan utama. Disisi lain, sistem integrasi juga harus dijalankan untuk mengatur hubungan adaptasi dan *goal attainment*”. (JD, Ahli Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 2021).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberlangsungan upaya pemulihan ekonomi melalui pemandirian masyarakat dapat dijalankan dengan adaptasi, tujuan, pencapaian, integrasi dan *latency*. Tetapi, hal tersebut tidak mudah dilakukan secara mandiri oleh pemerintah. Berbagai elemen masyarakat harus saling bekerjasama sebagai upaya pemulihan ekonomi. Sehingga, struktur ekonomi mulai beradaptasi dengan suatu masalah yang terjadi. Dengan kata lain, disfungsi yang muncul ditengah masyarakat dapat membuat kehidupan ekonomi mereka diharapkan berubah (Suliswati & Razi, 2020). Oleh karena itu, hasil studi ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung tercapaannya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan oleh partisipan menunjukkan bahwa pendekatan yang dapat digunakan untuk menunjang strategi pemberdayaan masyarakat ditengah pasca pemulihan dengan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi. Keterbukaan tersebut dapat dilakukan melalui LSM yang ikut dalam memberikan pemahaman terkait unsur inovasi.

“Menurut saya, upaya pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan hanya dengan pemberdayaan masyarakat tanpa ada metode yang tepat. Sehingga, LSM maupun pemerintah dalam mengimplementasikan strategi pemberdayaan masyarakat perlu mengutamakan metode yang membuka ruang akan adanya proses dialog. Proses dialog yang dilakukan melalui sosialisasi juga harus mengundang beberapa ahli yang berkaitan di bidang kesehatan dan ekonomi. Hal ini penting dilakukan baik antara fasilitator dengan penerima manfaat (masyarakat) atau kelompok sasaran. Sehingga, pemilihan metode diskusi secara interaktif lebih diutamakan daripada hanya menetapkan metode ceramah” (JD, Ahli Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 2021).

“Dalam melakukan proses sosialisasi, terutama menjelaskan terkait beberapa perubahan kebijakan pemerintah mengenai pengendalian penyebaran virus Covid-19, kami mengundang berbagai perwakilan masyarakat untuk melakukan diskusi terkait upaya pemulihan ekonomi. Seperti melakukan sosialisasi terkait melakukan vaksin. Sehingga, masyarakat diarahkan untuk melakukan vaksin agar bisa melakukan aktivitas seperti bekerja, berdagang, dan lain sebagainya. Namun, masih ada beberapa warga yang tidak mau melakukan vaksin dengan berbagai alasan. Kondisi inilah yang kita luruskan kepada mereka dengan memberikan beberapa penjelasan”. (JB, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, 2021).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa metode dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting salah satunya membuka ruang dialog. Disamping itu, untuk memulihkan perekonomian salah satu langkahnya dengan melakukan vaksinasi. Meskipun, dalam proses kegiatan tersebut tidak semua program dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam menghadapi masyarakat yang kurang berdaya juga dibutuhkan kesabaran. Seperti halnya beberapa diantara masyarakat yang tidak menginginkan untuk melakukan vaksin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi LSM dan pejabat setempat untuk melakukan edukasi. Karena, vaksinasi menjadi strategi pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dan memulihkan perekonomian. Oleh karena itu, harus diupayakan agar sebagian besar tim fasilitator LSM berasal dari wilayah setempat atau telah dikenal oleh penerima manfaat. Tim fasilitator yang berasal dari wilayah setempat dapat mempermudah proses sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi dalam program pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan memberikan suntikan modal sebagai stimulant. Tetapi, kita harus juga menjamin adanya kerjasama dan kemitraan yang dan telah maju dengan yang belum berkembang (JD, Ahli Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 2021).

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun LSM. Program tersebut adalah sosialisasi mengenai Covid-19, vaksinasi, dan kartu pra kerja. Namun, program tersebut secara keseluruhan belum dapat dikatakan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembangunan yang dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian menjadi paradigma yang semakin dominan di negara-negara berkembang. Sehingga, keberhasilan yang dicapai justru menimbulkan resiko yang negatif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh partisipan sebelumnya. Program kartu pra-kerja yang diberikan kepada masyarakat dengan menambahkan dana insentif digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Untuk itu, kondisi tersebut memberikan gagasan baru tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang menjamin keberlanjutan dalam pembangunan. Sehingga, salah satu langkah yang harus dilakukan dalam menjaga ketahanan ekonomi untuk menghadapi pasca pandemic dapat dilakukan dengan menambah sumber pendapatan keluarga. Namun, strategi pemberdayaan tersebut tidaklah mudah. Karena, tidak semua masyarakat memiliki modal untuk memulai bisnis. Walaupun, dimasa pandemi perubahan kegiatan bisnis menjadi berbeda dikarenakan penggunaan sarana digital.

Melalui perspektif ekonomi pertahanan, strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan fiskal. Dengan kata lain, negara memiliki peran dengan melakukan pendanaan investasi secara langsung melalui penyediaan pelayanan publik secara efisien. Sehingga, kegiatan tersebut mendorong perekonomian dan meningkatkan investasi jangka panjang. Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan dari LSM sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat menjadi penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat (Ronasifah et al., 2019). Perspektif ekonomi pertahanan menawarkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga, fokus pemberdayaan tersebut melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah (Amini et al., 2021). Berdasarkan perspektif ekonomi pertahanan, strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berpengaruh terhadap ekonomi yang positif. Dimana pendekatan pemberdayaan tersebut memberikan tekanan terhadap otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang didasari oleh sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Sehingga, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebagai bidang ekonomi tetapi juga politis. Adanya pendekatan

dialogis inilah yang membuat kebijakan yang dikeluarkan mengenai pandemi Covid-19 terus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat.

LSM maupun pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat memiliki tantangan tersendiri. Karena, bagi masyarakat yang diberdayakan untuk memperoleh pendapatan tersebut akan sulit jika perkantoran, sekolah, kampus dan berbagai tempat publik ditutup. Oleh sebab itu, memenuhi kebutuhan pokok menjadi keputusan yang lebih rasional karena mereka memiliki sumber penghasilan lain untuk memperolehnya. Sehingga, metode komunikasi menjadi langkah penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan komunikasi akan berjalan efektif jika dilakukan melalui pendekatan dialogis. Sehingga, komunikasi harus dilakukan secara interaktif dalam suasana harmonis dan kekeluargaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Steiner et al. (2022) dimana pemberdayaan masyarakat memberikan kekuatan kepada kelompok yang tidak berdaya untuk hidup mandiri. Hal inilah yang membuat pendekatan dialogis menjadi penting sebagai strategi ekonomi pertahanan. Strategi ini dilakukan dengan cara meninjau kondisi ekonomi makro dan mikro di masyarakat. Untuk selanjutnya dikembangkan dengan aspek pemberdayaan masyarakat (Chamber, 1996). Dimana dalam aspek *enabling*, LSM berupaya menciptakan suasana yang dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk terus berkembang. Salah satunya dengan pendekatan dialogis berkenaan dengan Covid-19 dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat selama pandemi Covid-19 (van der Ploeg, 2020). Disamping itu, pemerintah melakukan *empowering* dengan memperkuat potensi dari masyarakat melalui langkah strategis seperti kartu pra kerja. Sehingga, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memulihkan krisis ekonomi dengan membuat kartu pra kerja. Kartu pra kerja menjadi program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dengan fasilitator yang disediakan langsung untuk melatih mereka. Namun, tidak semua masyarakat memahami prosedur dari kartu pra kerja. Hal inilah yang menjadi tugas LSM dalam melakukan pendekatan dialogis (Sabati et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dan LSM berupaya untuk melakukan *protecting* dengan melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan dari masyarakat yang lemah. Pemerintah melakukan perlindungan dengan membuat kebijakan yang terus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya LSM berupaya untuk ikut melindungi dan membela melalui pendekatan dialogis mulai dari sosialisasi sampai dengan menyediakan diskusi terbuka untuk masyarakat.

Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan strategi pemberdayaan masyarakat pasca pandemi membutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam menerima dan memberikan informasi. Dalam perspektif ekonomi pertahanan, pemerintah juga harus dapat merencanakan pembangunan berbasis ketahanan pangan, ketahanan keluarga, dan pengeluaran ketahanan. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan yang akan dilakukan pasca pandemi. Oleh sebab itu, baik LSM, pemerintah dan masyarakat juga dapat saling memberikan masukan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat. Walaupun masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi mereka juga harus ikut berpartisipasi dalam bertanggung jawab terhadap informasi yang diterima. Meskipun program-program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan LSM masih belum memenuhi kebutuhan, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan pasca pandemi. Sehingga, dalam melakukan sosialisasi masyarakat dapat peka terhadap strategi pembangunan berkelanjutan pasca pandemi.

Referensi

- Agustina, E., Ernawati, Irvita, M., & Putri, C. P. (2021). Dampak Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, 1(1), 89–100.
- Amini, A. Z., Navalino, D. A., & Widana, I. D. K. K. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 235–244.
- Ardo, I. M., Lenshie, N. E., Amuchie, A. A., Ezeibe, C., Udeogu, C., & Nneka, O. (2022). COVID-19 pandemic, policy-intensified economic crisis and declining state control in Nigeria. *Democracy and Security*.
- Arredondo, E., Kashyap, R., & Surani, S. (2021). Tsunami of economic turmoil to hit the healthcare in 2021-2022: COVID-19 pandemic is just an earthquake. *Hospital Practice (1995)*, 49(4), 232–239. <https://doi.org/10.1080/21548331.2021.1917896>
- Ataöv, A., Kahraman, Z. E. H., & Osmay, S. (2021). Empowering the community through participation and action in historic neighbourhood conservation planning. *Frontiers of Architectural Research*, xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.12.001>

- Ba, S., & Bai, H. (2020). Covid-19 pandemic as an accelerator of economic transition and financial innovation in China. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 18(4), 341–348. <https://doi.org/10.1080/14765284.2020.1855394>
- Bechange, S., Jolley, E., Gascoyne, B., Smith, K., Griffiths, A., Ngorok, J., & Schmidt, E. (2021). Livelihood outcomes in a cohort of youth with disabilities following participation in an economic empowerment programme in rural Uganda. *Disability and Health Journal*, 14(3). <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2021.101069>
- Chambers, R. (1996). Participatory rural appraisal and the reversal of power. *The Cambridge Journal of Anthropology*, 19(1), 5–23.
- Cheung, T. M. (2011). The chinese defense economy's long march from imitation to innovation. *Journal of Strategic Studies*, 34(3), 325–354. <https://doi.org/10.1080/01402390.2011.574976>
- Dasgupta, P., Panda, M., Bansal, R., & Sahay, S. (2021). Impact of COVID-19 on India: alternative scenarios for economic and social development. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 26(2), 319–343. <https://doi.org/10.1080/13547860.2021.1917096>
- Fadhilah, N. (2020). Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(4), 242–251. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i4.168>
- Faskhutdinov, A. (2015). Modernization of the Russian Economy in Terms of Innovative Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 210, 188–192. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.358>
- Friedman, J. (1994). *Cultural identity and global process*. Sage.
- Fu, X., Zhang, J., & Wang, L. (2020). Introduction to the special section: the impact of Covid-19 and post-pandemic recovery: China and the world economy. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 18(4), 311–319. <https://doi.org/10.1080/14765284.2020.1855939>
- Hall, C. M., Scott, D., & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: be careful what you wish for. *Tourism Geographies*, 22(3), 577–598. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759131>
- Hanotubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal Education, Psychology and Counseling*, 2(1).
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *SosioGlobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Hossen, M. A. (2016). Participatory mapping for community empowerment. *Asian Geographer*, 33(2), 97–113. <https://doi.org/10.1080/10225706.2016.1237370>
- Johnson, L. (2014). Culturally Responsive Leadership for Community Empowerment. *Multicultural Education Review*, 6(2), 145–170. <https://doi.org/10.1080/2005615x.2014.11102915>
- Junfeng, R., Yechi, M., Farmanesh, P., & Ullah, S. (2022). Managing transitions for sustainable economic development in post-COVID world: do fiscal and monetary support matter? *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 0(0), 1–14. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2028176>
- Le, T. H., & Tran-Nam, B. (2018). Trade liberalization, financial modernization and economic development: An empirical study of selected Asia–Pacific countries. *Research in Economics*, 72(2), 343–355. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2017.03.001>
- Li, Y., & Mutchler, J. E. (2020). Older Adults and the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic. *Journal of Aging and Social Policy*, 32(4–5), 477–487. <https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1773191>
- Li, Z., Farmanesh, P., Kirikkaleli, D., & Itani, R. (2021). A comparative analysis of COVID-19 and global financial crises: evidence from US economy. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 35(1), 2427–2441. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1952640>
- Luitel, Y. R. (2017). Participatory Research and Empowerment: A Conceptual Revisit of the Debate on Alternative Social Science Research. *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 11, 115–129. <https://doi.org/10.3126/dsaj.v1i10.18825>
- McDonough, J. F. (2013). *Community Analysis and Practice: Toward a Grounded Civil Society*. Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. (Second). SAGE Publication.
- Narasari, P., Tantiprasoplap, S., Mekwiwatanawong, C., Sanongdej, W., & Piaseu, N. (2020). Management of food insecurity in the COVID-19 pandemic: a model of sustainable community development. *Health Care for Women International*, 41(11–12), 1363–1369. <https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1823984>
- Palutturi, S., Saleh, L. M., Rachmat, M., Malek, J. A., & Nam, E. W. (2021). Principles and strategies for aisles communities empowerment in creating Makassar Healthy City, Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, 35, S46–S48. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.12.013>
- Purwandari, E., Chamidah, A. N., & Mumpuniarti. (2018). Pemberdayaan Orang Tua Dan Masyarakat Di Desa Balingasal Dalam Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 13(2), 14–21.

- <https://doi.org/10.21831/jpk.v13i2.19133>
- Rianto, R., Prihantoro, K., Santosa, A. I., Pramono, B., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2021). Kebijakan Publik Desa Wisata Solusi Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mendukung Ekonomi Pertahanan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1441–1449.
- Rolfe, S. (2016). Divergence in Community Participation Policy: Analysing Localism and Community Empowerment Using a Theory of Change Approach. *Local Government Studies*, 42(1), 97–118. <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1081848>
- Ronasifah, F., Ati, N. U., & Hayat. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 53–61. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3698/3617>
- Sabiati, Hastjarjo, S., & Sudarmo. (2022). Komunikasi Dialogis dalam Rangka Penyelesaian Konflik Antara Pelaku Industri dengan Masyarakat. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 51–55.
- Siregar, R. Y., Gunawan, A. H., & Saputro, A. N. (2021). Impact of the Covid-19 Shock on Banking and Corporate Sector Vulnerabilities in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(2), 147–173. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1956397>
- Steiner, A., McMillan, C., & Hill O'Connor, C. (2022). Investigating the contribution of community empowerment policies to successful co-production- evidence from Scotland. *Public Management Review*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2033053>
- Suliswati, D., & Razi, F. (2020). Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 348. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28977>
- Sutrisno, E. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 87–96.
- van der Ploeg, J. D. (2020). From biomedical to politico-economic crisis: the food system in times of Covid-19. *Journal of Peasant Studies*, 47(5), 944–972. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1794843>
- Vernengo, M., & Nabar-Bhaduri, S. (2020). The Economic Consequences of COVID-19: The Great Shutdown and the Rethinking of Economic Policy. *International Journal of Political Economy*, 49(4), 265–277. <https://doi.org/10.1080/08911916.2020.1857589>
- Wardhana, W. (2016). Poros Maritim: Dalam Kerangka Sejarah Maritim Dan Ekonomi Pertahanan. *Masyarakat Dan Budaya*, 18(3), 369–386. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/569>